

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BERPERKARA MENGGUNAKAN
E-COURT MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Ayi Yuntami

NPM : 1721010143

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H/2021 M**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BERPERKARA MENGGUNAKAN
E-COURT MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Ayi Yuntami

NPM : 1721010143

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah)

Pembimbing I : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H/2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelaskan dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Skripsi ini berjudul **Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap.
3. Berperkara menggunakan *e-court*, *e-court* merupakan sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para

¹ Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1983). h. 56.

pihak secara *online*, taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan.²

4. Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) diseluruh dunia. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih dalam, tentang Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

B. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat empat Peradilan yang dapat menjalankan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap lingkungan Peradilan memiliki kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai kapasitasnya sebagaimana diatur dalam

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, ed. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. h. 7.

³ Nurul Hidayah et al., "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 4, No. 2 (2021): 47-49.

Undang-Undang. Diantara kewenangannya yang paling dominan, yakni bidang perkawinan khususnya di kasus perceraian adalah Pengadilan Agama.⁴

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam Pasal 49 yang berbunyi:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.⁵

Peradilan di Indonesia menganut suatu Asas yang bernama *contante justitie* atau Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶

Penjabaran secara konkret didasari pada penetapan batas waktu dan biaya tidak cukup untuk dapat memahami permasalahan dan kemudian menentukan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan terhadap sistem peradilan agar efektif dan efisien dengan sasaran utama

⁴ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jilid 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). h. 302.

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁶ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tercapainya hukum dan keadilan. Pendekatan terhadap permasalahan berkenaan dengan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilakukan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa pelaksanaan sistem peradilan yang baik adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standard minimum dalam penerapan suatu sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standard minimum tersebut adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sederhana dan cepat, efektif dan efisien, memiliki akuntabilitas dan transparan.⁷

Dengan kehadiran Posbakum juga merupakan sarana bagi warga Negara untuk mendapatkannya agar dibela oleh penasehat hukum (*access to legal council*) dalam menghadapi masalah hukum dan memperoleh perlakuan yang sama dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya (*equality before the law*). Perihal bantuan hukum, termasuk Posbakum, memakai prinsip *equality before the law* dan *access to legal council* dan di dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁸

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen

⁷ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: PT Alumni, 2012). h. 231.

⁸ Abdul Qodir Zaelani, "Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Kota Bandar Lampung", *Al-Istinbath*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2020), h. 136.

perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁹

Setiap para pencari keadilan ingin menyelesaikan suatu perkara yang cepat dan tidak berbelah-belah karena pencari keadilan tentunya ingin mendapatkan sebuah kepastian hukum atas permasalahan dalam perkara yang ia ajukan. Pemeriksaan yang berbelah-belah atau tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Administrasi yang dirasa begitu sulit membuat masyarakat terkadang enggan untuk datang ke pengadilan. Selayaknya pengadilan sebagai sarana pelayanan publik yang merupakan fasilitas lembaga kenegaraan harus menyediakan ruang keadilan sebagai asas kebermanfaatan.¹⁰ Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.¹¹

Pengertian cepat, sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sudikno Mertokusumo

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰ Novitalia, "*Analisis Yuridis Penggunaan E-court di Pengadilan*", (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020), h. 3.

¹¹ Irwantoni, Chaidir Nasution, Abdul Qodir Zaelani. "Peranan Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung)" *Asas*, Vol. 10, No, 01 (2018), h. 122.

berpendapat bahwa yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, maka semakin baik.¹²

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, hal ini dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hukum-hukum atau aturan yang diterapkan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kesukaran, maka syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:¹³

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa syari'ah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. Demikianlah makna umum yang bisa ditarik dari ayat diatas.

¹² Novitalia, “Analisis Yuridis Penggunaan E-court di Pengadilan”, h. 48.

¹³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 59.

Dalam sumber hukum, HR. Al-Bukhari, dapat dijelaskan sebagai berikut:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَابَسِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا

*“Mudahkanlah mereka dan janganlah kamu menyulitkan dan gembirakanlah dan jangan menyebabkan mereka lari”*¹⁴

Menurut penulis bahwa kaidah kedua menyatakan kebijakan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dimana Mahkamah Agung memberi kemudahan dan tidak menyulitkan para pencari keadilan untuk menggunakan aplikasi *e-court* yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya layanan *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia Peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang dicetuskan pada Maret 2018 dan disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Maritim yang

¹⁴ *Ibid.* h. 60

memiliki *issue* utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, hal ini memungkinkan para pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan aplikasi *e-court* dan akan menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di Pengadilan.¹⁵

Sistem aplikasi *e-court* merupakan salah satu usaha Pemerintah yang dilakukan guna memudahkan rakyat yang mengalami perekonomian lemah dalam berperkara di Pengadilan. Rakyat Indonesia tak sedikit yang mengeluh akan proses berperkara di Pengadilan yang sangat lama, memerlukan biaya mahal, dan terkesan bertele-tele. Mahkamah Agung menjawab kebutuhan rakyat tersebut melalui terobosannya yaitu dengan adanya aplikasi *e-court* untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan yang terkendala waktu, jarak, dan biaya. Sistem aplikasi *e-court* juga merupakan penerapan dari asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶

E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya perkara secara online (*e-skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan

¹⁵ Ika Atika, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia". (Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, *Socisl and political challenges in industry 4.0*, Banten, 2018), h. 109.

¹⁶ Abdul Manan, dkk., *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2001), h. 447.

Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (*e-litigation*).¹⁷ Artian sendiri persidangan yang berbasis elektronik adalah keseluruhan proses dimulai perihal memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan semuanya dilaksanakan secara *online* dengan di dukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam sidang elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal computernya.¹⁸ *E-litigation* merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-court (Elektronik Court)*. Sesuai peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dimana memanfaatkan aplikasi *e-court* sebagai pelaksanaan persidangan secara *online* dan memanfaatkan aplikasi *e-litigation* sebagai pertemuan, koordinasi dan tugas kedinasan lainnya yang dilaksanakan di tempat tinggal dimana kantor pengadilan tersebut berada.

Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sudah berlaku pelayanan secara *online (E-court)*, bagi pengguna terdaftar

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. h. 7

¹⁸ *Ibid.* h. 10.

untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online* (*e-skum*), Pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*) dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-summons*) dan Persidangan secara *online* (*e-litigation*).¹⁹

Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bisa melalui manual dan secara *online* (*e-court*). Pada tahun 2020 sesudah adanya covid-19 perkara yang masuk melalui manual berjumlah 1891 perkara sedangkan pada tahun 2020 adanya covid-19 sudah tercatat 233 perkara menggunakan *e-court*. tetapi hanya 4 perkara yang menggunakan *e-court* sampai dengan *e-litigation*. Sedangkan sisa dari perkara yang tidak selesai menggunakan *e-court* berjumlah 229 perkara tidak sampai persidangan secara *online* (*e-litigation*).²⁰

Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi pada awal tahun 2020 di Indonesia digemparkan dengan adanya *Virus Corona* dengan nama penyakit *corona virus disease 2019* atau biasa disebut Covid-19. Dampak dari pandemi covid-19 adalah terganggunya kinerja birokrasi utamanya dalam pengguliran program kegiatan serta serapan anggaran. Karena hal tersebut Pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan *Work From Home* (*WFH*) yang telah menjadi usulan *WHO*. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Instansi Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang pelaksanaan *WFH* untuk ASN termasuk pegawai

¹⁹ Wawancara dengan Dra. H. Nurkholish, M.H., Bandar Lampung, 25 Mei 2021.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Maidah A.Md, 18 Agustus 2021.

Peradilan (Mahkamah Agung) karena adanya pandemi covid-19 tersebut. Seluruh masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan yang menyebabkan setiap aktivitas dilakukan secara *daring (Online)*. Hal ini dilakukan untuk mencegah meningkatnya angka penyebaran covid-19.

Aplikasi *e-court* yang masih tergolong baru sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dibawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis teknologi. Menurut saya, Pelaksanaan pelayanan menggunakan aplikasi *e-court* ini sangat cocok digunakan pada saat ini karena di Indonesia sedang terjadi pandemi covid-19 dimana saat ini kita harus menjaga jarak agar kita tidak terpapar penyakit *Coronavirus Disease 2019*. Maka kita bisa melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada saat masa pandemi covid-19. Aplikasi *e-court* merupakan suatu bentuk perwujudan dari asas beracara di Pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berangkat dari pemikiran-pemikiran diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang “Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan *E-court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Pada penelitian ini di fokuskan kepada efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

D. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melihat sejauh mana pelaksanaan berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada masa pandemi covid-19 dan dapat menjadi referensi dan bahan diskusi oleh peneliti selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa akan datang.
2. Secara Praktis, bermanfaat bagi penulis dan menjadi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dan bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih bermanfaat dan memahami pelaksanaan berperkara menggunakan *e-court*, meskipun jauh dari kata sempurna dan perlu banyak perbaikan dalam berbagai hal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal ada beberapa yang memiliki kolerasi tema dan topik skripsi ini, untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) penelitian ini. Peneliti tidak menafikan keberadaan literatur lain ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini. Di antaranya adalah skripsi yang dibuat oleh :

1. Novitalia²¹, NIM: 1651400052, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan berjudul “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris/*field research*, karena penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi sebagai pencarian data primer melalui penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penggunaan aplikasi *E-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang adalah berdampak pada; masih sedikit perkara yang didaftarkan atau yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang secara *E-Court* belum terlaksananya asas

²¹ Novitalia, “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020), h. viii..

berperkara di Pengadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan dan kurangnya berkepastian hukum. Upaya peningkatan penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dapat dilakukan dengan cara; sosialisasi, kerjasama lembaga hukum, *upgrade* sistem berdasarkan instruksi Mahkamah Agung.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, sedangkan Penelitian sebelumnya penulis menjelaskan tentang dampak penggunaan aplikasi *e-court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dan Upaya peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian empiris/*field research*.

2. Fitri Rosmana²², NIM: 02011181621480, Mahasiswi Universitas Sriwijaya, dengan judul “*Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam*

²² Fitri Rosmana, “*Pelaksanaan Sistem E-court dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), h. xiii.

Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat di Kota Palembang”.

Pada skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di Kota Palembang dan Efektivitas pelaksanaan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang masih terdapat banyak kendala atau hambatan, seperti sarana dan prasarana yang belum mahir/memahami penggunaan jaringan internet; 2. Efektivitas pelaksanaan sistem *e-court* oleh advokat di Kota Palembang secara umum penerapannya telah dapat berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas peradilan.

Letak Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah, pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang Pelaksanaan berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA

Tanjung Karang, sedangkan Penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di Kota Palembang. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Jurnal Hary Djatmiko²³, yang berjudul “*Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah menggunakan pendekatan normative dalam menganalisis penerapan *e-court* secara kualitatif dalam melihat perluasan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan paska keluarnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dimana dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian untuk mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Yang menghasilkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi, efisiensi struktur dan system.

²³ Hary Djatmiko, “*Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”, (Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019).

Penggunaan teknologi informasi juga membantu hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili sesuatu perkara. Implikasi social penerapan *e-court* bagi para pencari keadilan melalui penerapan *e-court* bagi para pencari keadilan di pengadilan adalah semakin sederhana, cepat dan yang terpenting juga adalah biaya ringan.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, sedangkan Penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

H. Metode Penelitian

Untuk penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan

penelitian. Jadi, metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti akan terjun langsung di lokasi penelitian.²⁴ Dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada masa pandemi covid-19 dan efektivitas pelaksanaan berperkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Untuk lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang

²⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004), Cet-VIII, h. 3

disusun, dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian²⁵. Yang dimaksud dengan subjek penelitian disini ialah Hakim, Panitera, Panitera Muda, Jurusita, Advokat, Staf PTSP dan Pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court* pada tahun 2020.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari jenis data;²⁶

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian akan diolah oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Jurusita, Advokat, Staf PTSP dan Pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court* pada tahun 2020 di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105-106.

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, edisi kedua. Cet. 5. 2011), h. 103-104.

objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data sekunder saya mengambil dari buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya yang diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan dan melakukan pencatatan data untuk proses penelitian. Dalam observasi tersebut data yang diperoleh berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tersebut melalui Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam wawancara hal yang biasa terjadi adalah tanya jawab yang dilakukan sepihak secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara terdiri dari dua

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19, h. 80-81.

belah pihak yaitu pihak *information hunter* dan *information supplier*.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik itu catatan harian, maupun catatan penting lainnya.²⁹ Dalam penelitian ini data dokumentasinya berupa data perkara tahun 2020 pada saat terjadi pandemi covid-19 yang tercatat secara *e-court* dan non *e-court*.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Adapun populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 10 Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, 10 Jurusita, Staf PTSP, 4 Advokat yang melaksanakan sistem beracara menggunakan *e-court* dan 4 Pihak yang berperkara

²⁸ Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta; Bumi Aksara, 2018), Cet. I, h.65.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 160.

³⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 30.

menggunakan aplikasi *e-court* sampai dengan *e-litigation* pada tahun 2020 di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang.

b. Sampel

Sampel Penelitian adalah bagian dari Jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³¹ Dalam Penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan diambil sampelnya saja, antara lain 3 Hakim, Panitera, Panitera Muda Hukum, Jurusita, Staf PTSP dan 3 Advokat yang melaksanakan sistem beracara menggunakan *e-court* dan 3 Pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court* sampai dengan *e-litigation* pada tahun 2020 di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di lakukan dengan cara mengambil subyek bukan di dasarkan atas random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu.³² Yaitu dengan kriteria yang menjadi narasumber mengetahui aplikasi *e-court* dan pernah memakai aplikasi *e-court*.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya :

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 80-81.

³² *Ibid*, h. 122.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.
 - b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu merupakan dimana peneliti mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di awal berdasarkan focus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis di kelompokkan menjadi satu dan seterusnya.
6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.³³ Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Adapun tujuan analisis data

³³ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.12.

kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut dengan jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi bahan penelitian.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan untuk mengumpulkan data-data dilapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab:

Bab I (pendahuluan), untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan pokok masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul, yaitu penjelasan yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian pengertian Pengadilan dan pelaksanaan perkara menggunakan *E-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19. Kemudian focus dan sub focus masalah upaya menetapkan batasan-batasan masalah sehingga lebih jelas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya, maka diperlukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. kajian penelitian yang terdahulu relevan, berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi

pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

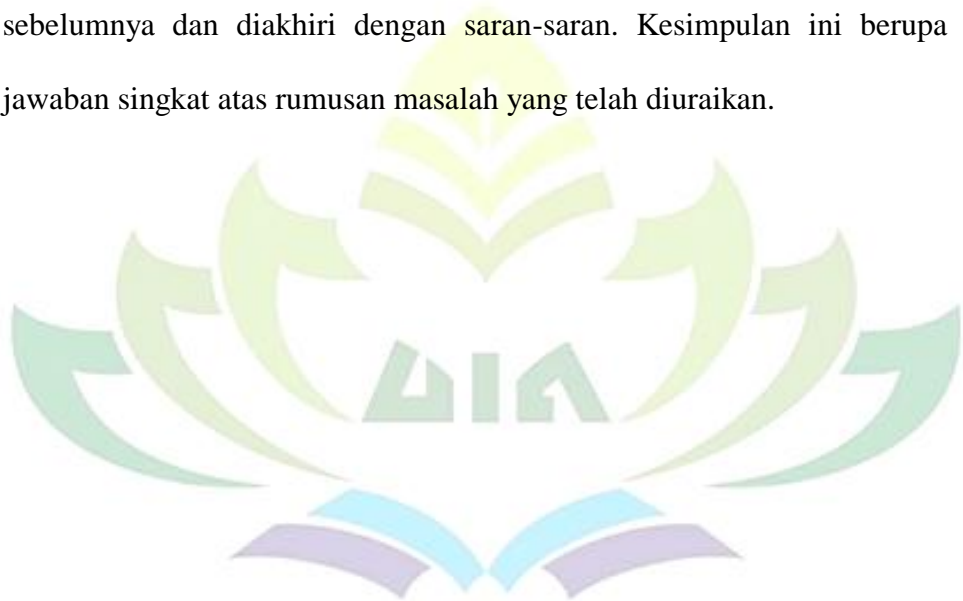
Bab II, (Landasan Teori) dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Pengertian dan Sejarah Lahirnya Aplikasi *E-court* di Indonesia, Dasar Hukum Aplikasi *E-court*, Sistem administrasi perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik dan Pengertian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bab III, (Deskripsi Objek Penelitian) dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, dimulai dari Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas Aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Kemudian menguraikan pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 dan terakhir hasil wawancara yaitu efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab IV, (Analisis Penelitian) pembahasan dalam bab ini meliputi, analisis penulisan terhadap data yang di dapat di lapangan yaitu Pelaksanaan Berperkara Menggunakan *E-court* Menurut PERMA No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Efektivitas Pelaksanaan Berperkara

Menggunakan *E-court* Menurut PERMA No 1 tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab V, (Penutup) bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang Efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, maka dapat penulis simpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah disusun ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkara menggunakan sistem *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sudah menerapkan sistem *e-court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pada masa pandemi covid-19 pelaksanaan perkara menggunakan sistem *e-court* tidak ada bedanya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Namun dapat dikatakan sudah berjalan secara maksimal karena adanya peningkatan pendaftaran melalui aplikasi *e-court* sampai dengan e-litigasi pada masa pandemi covid-19 yaitu tahun 2020.
2. Efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *e-court* menurut PERMA No 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bisa dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Rekomendasi

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Untuk masyarakat yang hendak melakukan berperkara di Pengadilan Agama, penulis merekomendasikan bahwa aplikasi *e-court* lebih efektif dalam menjalankan proses berperkara.
2. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang muslim tolong menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani, “Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”, *Al-Istinbath*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2020).
- Aburaera, Sukarno, *Kekuasaan Kehakiman*, Makassar: Arus Timur. 2012.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2001.
- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam praktek)*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Atika, Ika, *Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2018.
- Basah, Sjachran, *Mengenai Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Era Baru Beracara di Pengadilan Melalui Sistem E-Court”, tersedia di: <https://www.dJkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13197/Era-Baru-Beracara-di-Pengadilan-Melalui-Sistem-E-Court.html>, diunduh pada (17 Juli 2021).
- Djatismiko, Hary, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019
- Firdawaty, Linda, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hudiata, Edi, Artikel “*Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court, Majalah Peradilan Agama*”, 14 November 2018.
- Irwantoni, Chaidir Nasution, Abdul Qodir Zaelani, “Peranan Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung)”. *Asas*, Vol 10, No 01 (2018).
- Konradus, Danggur, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Bangka Adhinata Mulia, 2016.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung, 2019.
- Manan, Abdul, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Makara, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004.
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Nur, Aco dan Fakhrur, Aman, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.

Novitalia, “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*”, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020.

Paridah, Baiq, “*Implementasi dan Dampak E-court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Solong*”, Artikel Vol 2 No 1 (November 2018).

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali, 2013.

Rosmana, Fitri, “*Pelaksanaan Sistem E-court dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang*”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.

Suadi, Amran, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.

-----, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Sundari, E, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syamsuddin, Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Winarmi, Endang Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D (Cet. I)*. Jakarta; Bumi Aksara, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tentang Pemberitahuan Implementasi *e-Court* (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Wawancara

Nurkholish, wawancara dengan Hakim Madya Utama, Bandar Lampung, 25 Mei 2021.

K.M. Junaidi, wawancara dengan Utama Muda, Bandar Lampung, 10 Agustus 2021.

Edy Kisay, wawancara dengan Panitera, Bandar Lampung 10 Agustus 2021.

Zulhaida, wawancara dengan Panitera Muda Hukum, Bandar Lampung 10 Agustus 2021.

Maidah, wawancara dengan Staf PTSP, Bandar Lampung 18 Agustus 2021.

Mastuhi, wawancara dengan Jurusita, Bandar Lampung 18 Agustus 2021.

Berilian Arista, wawancara dengan Advokat, Bandar Lampung, 2021.

Rabiah Adawiyah N, wawancara dengan Hakim Madya Utama, Bandar Lampung, 20 Agustus 2021.

Fathul S.H., wawancara dengan Advokat, Bandar Lampung, 20 Agustus 2021.

Nur Rahma, wawancara dengan Advokat, Bandar Lampung, 20 Agustus 2021.

Ida Laila, wawancara dengan Pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court*, Bandar Lampung, 20 Agustus 2021.

Yulia Citra, wawancara dengan Pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court*, Bandar Lampung, 20 Agustus 2021.

Hendra Sagita, wawancara dengan Pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court*, Bandar Lampung, 20 Agustus 2021.

